

**PELAKSANAAN PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI
DI DESA AJUNG KECAMATAN AJUNG**

*The Implementation of Subsidized Fertilizer Distribution
in Ajung Village, District of Ajung, Jember Regency)*

Kaharudin Syah, Inti Wasiati, M.Hadi Makmur
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121 E-mail:kaharudinsyah7@gmail.com

Abstract

The policy of subsidized fertilizer distribution where fertilizer is distributed through several lines goes from the distribution of subsidized fertilizer from the plant manufacturer (Line I). Factory as a manufacturer implements the distribution of subsidized fertilizer to manufacturer warehouses in the provincial capital area and fertilizer packaging unit (Line II), the manufacturer distributes subsidized fertilizer to manufacturer and/or distributor warehouses in regency/city designated or specified by the manufacturer (Line III) and carries out transportation up to warehouse or retail kiosk locations in the area of districts and/or villages designated or specified by the distributor (Line IV). This research aimed to describe the implementation of subsidized fertilizer distribution in Line IV Ajung Village, District of Ajung, Jember Regency and to identify the inhibiting factors of subsidized fertilizer distribution in Line IV Ajung Village, District of Ajung. The research used descriptive design. The research location was in Ajung Village, District of Ajung, Jember Regency. The results showed that the implementation of subsidized fertilizer distribution was in several stages: first, socialization of the fertilizer distribution was done in several chances in forums, meetings, both formal and informal with a number of parties involved in the fertilizer distribution; second, the preparation of RDKK (Definitive Plan of Group Needs) which contains name of members, land area based on SPPT (Land Tax), the amount of fertilizer needed by farmers. The inhibiting factors in the subsidized fertilizer distribution, among others: (1) the existence of tenants who could purchase subsidized fertilizer in Ajung Village, District of Ajung by connection in farmers' groups; (2) there was still a personal interest for profit in selling subsidized fertilizer; (3) the existence of purchasers from other groups that could buy kiosks which were not in their responsibility; (4) lack of trust of farmers to farmer groups; and (5) there were still farmers in the delivery of subsidized fertilizer during the growing season who did not comply with the recommended balanced fertilizer set by the government. The essence of the quota of the subsidized urea fertilizer in accordance with RDKK is the sufficiency of the needs of subsidized fertilizer for farmers. Thus, it is an obligation for the Government of Jember Regency to solve the problems in order that farmers are no longer charged with the fertilizer prices above HET (the highest retail price).

Keyword: Policy, Distribution, Fertilizer, Subsidized

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, salah satu faktor sarana produksi yang sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi adalah pupuk. Pemerintah sangat berkepentingan untuk mengeluarkan melakukan berbagai resolusi/ deregulasi kebijakan di bidang pupuk untuk menciptakan iklim yang kondusif bagi penyediaan pupuk di Indonesia, sehingga petani mudah mendapatkan pupuk sesuai dengan kebutuhannya. Pupuk merupakan komoditi yang memiliki peran strategis dalam mendukung sektor pertanian dan dalam upaya meningkatkan hasil produksi petani. Pupuk telah menjadi kebutuhan pokok bagi petani dalam produksi tanamnya. Menurut Permendag nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan atau petani di sektor pertanian meliputi pupuk urea, SP36, ZA, NPK, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pemerintahan.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi ini, berdasarkan Permentan Nomor 130 Tahun 2014 pasal 10 ayat 2 yang berbunyi, "Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian oleh Penyalur di Lini IV ke Petani atau Kelompoktani diatur sebagai berikut:

a. Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh Penyalur di Lini IV ke Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada Petani/Petambak dan/atau Kelompoktani.

b. Penyaluran Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan Kelompoktani dan alokasi di masing-masing wilayah.

Untuk itu dalam penyalurannya di Kabupaten Jember, Pemerintah Kabupaten Jember menggunakan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran Teringgi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015, penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di lini IV ke petani dilakukan sebagai berikut:

1. Penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV ke petani dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani/petambak dan atau kelompok tani.

2. Penyaluran pupuk bersubsidi memperhatikan kebutuhan petani/petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.

3. Dalam melancarkan penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV ke petani, penyuluh untuk masing-masing sub sektor melakukan pendataan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) di wilayahnya, hal

itu sebagai bahan pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi pupuk yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Dalam penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten Jember didasari atas RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) kemudian diberikan kepada produsen dalam hal ini Pupuk Kaltim dan Petrokimia Gresik untuk menerbitkan surat pengiriman terhadap distributor yang dipilih, lalu kemudian distributor yang ditunjuk oleh produsen menyalurkan pupuk bersubsidi kepada pengecer resmi di masing-masing kecamatan atau desa, untuk kemudian disalurkan kepada tiap masing-masing kelompok tani di kecamatan atau desa dengan membawa kartu kitir/kupon pengambilan.

Selain itu Untuk mendistribusikan pupuk bersubsidi pemerintah telah menetapkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan Pemerintah Tingkat I yaitu pemerintah Propinsi, maka Pemerintah Tingkat II yaitu Kabupaten Jember mengalokasikan pupuk bersubsidi untuk tingkat kecamatan yang nantinya RDKK kelompok tani disesuaikan dengan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember. berikut alokasi pupuk bersubsidi sektor pertanian di kabupaten Jember Tahun 2015.

Alokasi pupuk bersubsidi ini tidak memenuhi kebutuhan riil di Kabupaten Jember, terjadi kelangkaan pupuk urea bersubsidi di sektor pertanian ini disebabkan oleh pengurangan jatah pupuk urea berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Tentang Realisasi Pupuk

Bersubsidi tahun 2014, jatah pupuk kabupaten pada tahun 2014 sejumlah 89.041 ton untuk jenis pupuk Urea, 3.941 ton jenis SP36, 31.640 ton jenis pupuk NPK, dan 16.171 ton pupuk Organik, sedangkan kebutuhan petani dalam data RDKK (Rencana Kebutuhan Kelompok Tani) se kecamatan adalah pupuk Urea 91.190 ton, Pupuk SP 36 11.672 ton, pupuk NPK 38.989 ton, dan Organik 16.916 ton. Selain itu untuk tahun 2015 para petani juga mengalami kekurangan pupuk ini kembali dikarenakan oleh ketidaksesuaian permintaan pupuk dengan realisasi pupuk, yang mana permintaan pupuk untuk UREA sebesar 100.305 di realisasi 87.942, NPK permintaan 18.393,1 di realisasi 3.936, ZA permintaan 60.326,9 di realisasi 37.715, dan untuk Organik Permintaan 76.156,9 di realisasi 15.311.

Selain itu masih adanya kios resmi di beberapa desa yang menjual pupuk kepada petani yang tidak terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya bahkan kepada petani di luar desa yang bersangkutan, hal itu salah satu faktor yang mempengaruhi kelangkaan pupuk ketika waktu masa tanam tiba.

Dampak dari langkanya pupuk bersubsidi juga dirasakan oleh para petani di Desa Ajung Kecamatan Ajung hal ini dikarenakan Desa Ajung merupakan salah satu di kecamatan di Kabupaten Jember yang memiliki luas lahan pertanian yang luas dan merupakan salah satu kecamatan yang memiliki lahan sawah produktif.

Ada beberapa masalah yang mempengaruhi pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung di antaranya :

1. Ketidaksiharian RDKK di masing-masing kelompok tani dengan distribusi pupuk bersubsidi. Kelangkaan pupuk bersubsidi yang pada akhirnya berdampak pada mundurnya waktu panen.
2. Pemahaman terhadap distribusi pupuk yang dibagi per desa, ini dibuktikan dengan adanya petani dari kelompok tani lain yang tidak terdaftar di wilayahnya membeli pupuk di kios resmi Desa Ajung.
3. Ketidaktahuan para petani dalam pemberian pupuk berimbang.

Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik meneliti Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?
2. Apa saja yang menjadi faktor penghambat proses penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember?

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan dalam kepustakaan internasional disebut *public policy*. Dalam ilmu administrasi publik, kebijakan publik dimaknai beragam. Sedangkan kebijakan menurut James Anderson yang dikutip oleh Winarno, (2012:19)

menyampaikan bahwa “kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan.”

Menurut Thomas Dye (1981:1) dikutip dari Subarsono (2005:2) kebijakan publik adalah “Apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (Public policy is whatever governments choose to do or not to do)”. Sedangkan James Anderson dikutip dari Subarsono (2005:2) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun disadari bahwa kebijakan publik dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah.

Selain itu, Subarsono (2005:87) mengatakan bahwa “kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran”.

Implementasi Kebijakan

Subarsono (2005:87) mengatakan bahwa kebijakan yang telah direkomendasikan untuk dipilih oleh policy bukanlah jaminan bahwa kebijakan tersebut pasti berhasil dalam implementasinya. Ada banyak variabel yang

mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan baik yang bersifat individual maupun kelompok atau institusi. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya policy maker untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran.

Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warganya.

Menurut Randall B. Ripley dan Grace (dalam Subarsono 2005:89) menulis sebagai berikut: *“Implementation process involve many important actors holding diffuse and competing goals and expectation who work within a contexts of an increasingly large and complex mix of government program that require participation from numerous layers and units of government and who affected by powerful factors beyond their control (Ripley and Franklin, 1986:11).”*

Dalam artian kompleksitas implementasi bukan saja ditunjukkan oleh banyaknya aktor atau unit organisasi yang terlibat, tetapi juga dikarenakan proses implementasi dipengaruhi oleh berbagai variabel organisasional, dan masing-masing variabel tersebut juga saling berinteraksi satu sama lain.

Implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Winarno 2012:149) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau

kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan sebelumnya.

Menurut George C. Edward III (dalam Winarno, 2012:177), implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik.

Model Implementasi Kebijakan

Model Implementasi Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam Subarsono (2005:93) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*).

Model Implementasi Kebijakan Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dikutip dari Nugroho (2014:220) menyatakan bahwa implementasi melaksanakan keputusan kebijakan dasar, biasanya digabungkan dalam anggaran dasar tetapi juga mengambil bentuk perintah eksekutif atau keputusan pengadilan yang penting. Idealnya, keputusan mengidentifikasi masalah yang dihadapi, menetapkan tujuan untuk dikejar, dan dalam berbagai cara untuk mengkonstruksiasi proses implementasi.

Model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn yang dikutip Winarno (2012:158-159) dalam model ini mempunyai enam variabel yang membentuk kaitan antara kebijakan dan kinerja. Model ini tidak hanya menetuka antara variabel-variabel bebas terikat mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga menjelaskan hubungan antara variabel-variabel bebas. Selanjutnya menyatakan bahwa secara implisit, kaitan yang tercakup dalam bagian tersebut menjelaskan hipotesis-hipotesis yang dapat diuji empirik. Selain itu indikator-indikator yang memuaskan dapat dibentuk dapat dikumpulkan.

Model Implementasi Kebijakan George Edward III

Menurut pandangan Edwards III (dalam Subarsono,2005:91) Implementasi kebijakan adalah krusial bagi public administration dan public policy. Implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni : (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi. Keempat variable tersebut juga saling berhubungan satu sama lain.

Berdasarkan perbandingan beberapa model implementasi menurut tokoh-tokoh diatas maka peneliti menggunakan model Merilee S. Grindle, model implementasi yang dikembangkan oleh Merilee S.Grindle ini hanya lebih sesuai apabila digunakan pada saat implementasi saja, karena dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi sangat rawan terjadi penyimpangan dan beberapa

kepentingan oknum-oknum yang terlibat untuk mencari keuntungan.

Rent Seeking

Seperti yang dikutip dalam Deliarov (2005:59) konsep rente awalnya dikembangkan oleh ahli ekonomi klasik David Ricardo yang mengamati tingkat kesuburan tanah berbeda-beda. Petani yang memiliki tanah yang lebih subur bisa beroperasi dengan biaya rata-rata lebih tinggi, sedangkan petani yang memiliki lahan kurang subur beroperasi dengan biaya lebih tinggi. Perbedaan dalam tingkat kesuburan tanah berpengaruh terhadap sewa tanah, adapun sewa tanah menurut Ricardo adalah perbedaan antara penerimaan yang diperoleh petani yang memiliki lebih subur dengan penerimaan yang diterima oleh petani marjinal, yaitu petani yang menganggap tanah paling tidak subur tetapi tetap bisa beroperasi dimana penerimaannya hanya cukup untuk ongkos produksi. Ini berarti terkait erat dengan tingkat kesuburan dan pemilik tanah paling subur akan menikmati sewa paling tinggi.

Menurut Deliarov (2005:59) laba yang diterima penguasa melalui kekuasaan yang dimilikinya dan digunakan untuk mengejar kepentingan pribadi disebut rente. Adapun perilaku aparat atau penguasa yang mengharapkan imbalan yang tinggi atas kebijakan yang dikeluarkannya disebut perilaku kalap rente atau *rent seeking behavior*.

Konsep Pelaksanaan Penyaluran Pupuk Bersubsidi

Dalam upaya peningkatan produksi di sektor pertanian, khususnya komoditi pangan, pemerintah

telah menyediakan berbagai fasilitas produksi, antara lain subsidi pupuk untuk sektor pertanian. Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2013 Tentang Kebutuhan dan Penyaluran serta Harga Eceran Teringgi (HET) Pupuk bersubsidi Jawa Timur, “pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi pemerintah untuk kebutuhan Kelompok Tani dan/atau Petani di Sektor Pertanian”.

Tujuan pemberian pupuk bersubsidi adalah untuk meringankan beban petani dalam penyediaan dan penggunaan pupuk untuk kegiatan usahanya sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan produksi komoditas pertanian guna mendukung ketahanan pangan nasional.

Sedangkan penyaluran pupuk pada tahun 2014 melalui RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) yang disusun oleh masing-masing GAPOKTAN yang tujuannya adalah untuk menjamin pupuk bersubsidi dengan jenis, jumlah, dan waktu sesuai kebutuhan petani atau kelompok tani dan alokasi yang ditetapkan dalam permentan serta disalurkan oleh distributor resmi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian, pupuk disalurkan berjenjang dari beberapa lini, yaitu penyaluran pupuk bersubsidi dari pabrik produsen (Lini I). Pabrik sebagai produsen melaksanakan penyaluran pupuk bersubsidi ke gudang produsen di wilayah ibukota provinsi dan unit pengantongan

pupuk (Lini II), produsen menyalurkan pupuk bersubsidi untuk gudang produsen dan / atau distributor di wilayah kabupaten//kota yang ditunjuk atau ditetapkan oleh produsen (Lini III), dan melaksanakan pengangkutan sampai di lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan / atau/desa yang ditunjuk atau ditetapkan oleh distributor (Lini IV).

Fokus dalam penelitian ini adalah penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV. Penyalur pupuk bersubsidi dari pengecer (Lini IV) kepada petani dan atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 yang mana penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani atau kelompok tani berdasarkan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) kepala dinas Provinsi dan Kabupaten/kota dengan mempertimbangkan alokasi pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati/Walikota lalu kemudian disalurkan pada Lini IV, pada Lini IV inilah pengecer resmi wajib menjamin ketersediaan pupuk dan resmi mendistribusikan pupuk bersubsidi yang terdaftar dalam RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Untuk mendapatkan pupuk bersubsidi petani harus tergabung di kelompok tani yang nantinya menyusun RDK (Rencana Definitif Kebutuhan) dan RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok).

Lebih lanjut, dalam pelaksanaannya penyaluran pupuk bersubsidi mendapat pengawasan baik dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Fungsi dari pengawasan tersebut adalah agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, perlunya dibentuk tim pengawasan untuk pelaksanaan pendistribusian pupuk bersubsidi. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Penyaluran Serta Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015.

METODE PENELITIAN

Menurut Soehartono (2005:9), “metode penelitian adalah cara atau strategi menyeluruh untuk menemukan atau memperoleh data yang diperlukan”. Berdasarkan pernyataan menurut pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan pengertian metode penelitian adalah suatu cara atau alat melalui langkah-langkah yang harus dilakukan oleh peneliti sesuai prosedur dan sistematis, sehingga dapat memecahkan suatu fenomena-fenomena masalah di lapangan dan nantinya dapat diperoleh data yang objektif dan valid.

Sesuai dengan judul dan rumusan masalah dalam penelitian, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menurut Creswell dalam Ahmadi (2014:15) penelitian kualitatif merupakan suatu proses inkuiri untuk

pemahaman berdasarkan tradisi med ikuiri metodologis yang jelas yang mengeksplorasi masalah sosial dan manusia. Sedangkan untuk lokasi penelitian, dilakukan di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel atau informan dengan metode purposive sampling. Menurut Sugiyono (2008:53-54) menjelaskan bahwa purposive sampling adalah:

“teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti”.

Peneliti mendapatkan informasi ke informasi berikutnya sesuai dengan rekomendasi dari informan sebelumnya. Proses pengumpulan data dihentikan setelah data yang terkumpul dianggap telah memenuhi target yang ingin dicapai, yaitu ketika menemukan jawaban yang sama disetiap informan artinya tidak lagi dijumpai jawaban baru dilapangan setelah berkali-kali dilakukan penggalan informasi.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dalam suatu penelitian, data merupakan suatu hal yang sangat penting karena dengan data akan mempermudah untuk menganalisa dari suatu masalah. Adapun teknik pengumpulan data yang

peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.

Tahap akhir penelitian ini adalah menganalisis data-data yang diperoleh sesuai dengan permasalahan penelitian. Data-data yang telah terkumpul melalui observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi dipelajari serta ditelaah untuk selanjutnya diabstraksi secara cermat dan sistematis agar didapatkan hasil penelitian yang mendalam dan komprehensif.

Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis interaktif. Analisis interaktif merupakan suatu model analisis data kualitatif yang dibuat oleh Miles dan Huberman. Selanjutnya dalam model tersebut Miles dan Huberman yang dikutip oleh Achmadi (2014:231) mengemukakan bahwa “bersifat interkatif dimana antara satu tahapan dengan tahapan lain saling terkait”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diketahui bahwa dalam penyalurannya pupuk bersubsidi melibatkan banyak pihak terkait. Berdasarkan fokus penelitian yang ingin diteliti adalah penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV. Lini IV merupakan lokasi gudang atau kios pengecer di wilayah kecamatan dan/atau desa yang ditunjuk oleh Distributor. Di Lini IV pula penjualan pupuk bersubsidi dari pengecer kepada petani dan/atau kelompok tani dilakukan. Pemilihan fokus penelitian ini dengan pertimbangan penyimpanan HET rawan terjadi pada Lini IV. Selain itu pengecer menentukan pupuk bersubsidi yang

telah di distribusikan oleh distributor bisa sampai ke petani atau tidak.

Aktor-aktor yang terkait dalam pendistribusian pupuk bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung Berdasarkan fokus penelitian, maka aktor-aktor yang terkait dalam pendistribusian di Lini IV bagi petani di Desa Ajung sebagai berikut.

1. Penyusunan RDKK

a. Penyuluh Pertanian Lapangan dari Unit

Pelaksana Tekhnis Dinas Pertanian Wilayah Desa Ajung Kecamatan Ajung yakni Bapak Eko selaku PPL dan Bapak Karwisono.

b. Kelompok Tani Di Desa Desa Ajung yang diwakili oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani Di Desa Ajung Kecamatan Ajung.

c. Kepala Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yaitu Bapak Abdus Salam.

2. Pendistribusian

a. Kios-kios resmi di Desa Ajung yang terdaftar di distributor diantaranya

1. UD. Toko Baru

2. UD. Sari Agung

3. UD. Bintang Jaya

4. UD. Tani Makmur

5. UD. Mulya Mandiri

b. Kelompok Tani Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember yaitu.

1. Arjuna I

2. Sri Rejeki II

3. Harapan I
4. Makmur I
5. Maju I
6. Sri Rejeki I
7. Arjuna II
8. Harapan II
9. Makmur II
10. Maju II

3. Pengawasan

Unsur-unsur dari Tim Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Brsubsidi Kabupaten Jember

a. Tim Komisi Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi tingkat Kabupaten yakni Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan ESDM Kabupaten Jember, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Kabupaten Jember.

b. Komisi Pemantauan dan Pengawasan Pupuk bersubsidi tingkat Kecamatan, UPTD Dinas Pertanian Kabupaten Jember Wilayah Binaan Kecamatan Ajung.

Berikut Proses dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV Desa Ajung Kecamatan Ajung.

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan dalam berbagai kesempatan baik formal maupun informal. Sosialisasi ini dilakukan di Kantor Kecamatan Ajung. Kegiatan ini dihadiri oleh banyak pihak diantaranya Dinas

Pertanian, Staf UPTD Dinas Pertanian Kecamatan Ajung selaku Penyuluh Pertanian Kecamatan Ajung, Pengecer atau Kios Resmi dan Kelompok Tani. Sosialisasi juga dilakukan di kantor UPTD pada setiap hari Kamis, seperti yang dikatakan Bapak Rudi Kepala UPTD Kecamatan Ajung dan Ketua Pengawas dan Pemantau Pupuk bersubsidi Kecamatan Ajung pada wawancara yang dilakukan tanggal 14 Maret 2015, “Sosialisasi dilakukan rutin pada hari kamis di kantor UPTD di sela-sela kegiatan rutin PPL setiap desa”.

Selain itu, sosialisasi juga dilakukan pada kelompok yakni pada setiap rapat kelompok tani, seperti yang dikatakan oleh bapak Eko selaku Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Ajung pada wawancara tanggal 17 Maret 2015, untuk sosialisasi penyaluran pupuk bersubsidi kita lakukan selain di Kantor Kecamatan kita lakukan juga pada waktu rapat di pada setiap kelompok tani di lingkungan Desa Ajung hal itu upaya kita agar pengertian kelompok tani dan kios resmi itu dapat berekesinambungan dan biar tidak salah dalam menjalankan mekanisme penyaluran pupuk bersubsidi”.

2. Penyusunan RDKK

Pada tahap penyusunan RDKK langkah awal yang dilakukan oleh kelompok tani, dalam hal ini setiap ketua kelompok tani di Desa Ajung melakukan pendataan petani yang terdaftar di dalam area masing-masing kelompok tani. Pendataan ini dilakukan dengan dua cara. Pertama pendataan anggota kelompok tani melalui cara mendatangi langsung kepada petani berdasarkan

luas lahan kelompok tani yang ditentukan oleh Dinas Pertanian. Kedua, petani langsung datang sendiri kepada ketua kelompok tani untuk mendaftarkan sebagai anggota kelompok tani, apabila lahan usaha tani berada di wilayah binaan kelompok tani.

3. Pendistribusian Pupuk Bersubsidi

Dalam pembelian pupuk bersubsidi di kios resmi petani membeli dengan menunggu konfirmasi dari ketua kelompok tani bahwa petani yang bersangkutan merupakan anggota kelompok tani dan ditandai dengan kartu identitas berupa KTP. Seperti yang diungkapkan sebelumnya bahwa untuk menyalurkan pupuk setelah pecah Delivery Order (DO) sesuai luas hamparan maka distributor menginformasikan bahwa stok pupuk sudah bisa disalurkan kepada kios resmi untuk kemudian disalurkan kepada petani. dan penyaluran pupuk bersubsidi dari distributor ke kios resmi menunggu konfirmasi dari kios bersangkutan untuk mengambil pupuk bersubsidi di distributor hal ini bertujuan agar meminimalisir penyalahgunaan penyaluran pupuk bersubsidi dari kios kepada petani yang terdaftar di RDKK kelompok tani yang terdaftar di kios tersebut.

4. Pengawasan

Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan oleh beberapa pihak terkait, diantaranya pihak pemerintah, swasta, masyarakat, maupun pihak-pihak yang berekspansi. Pengawasan penyaluran pupuk dibuat sebuah tim yang disebut Komisi Pemantauan dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi (KPPPP). Pada tingkat Kabupaten Tim

LP3 diatur dalam SK Bupati Jember Nomor 188.45/23/012/2014 Tentang Komisi Pengawasan Pupuk dan Prestisida Kabupaten Jember.

Faktor-faktor penghambat dalam penyaluran pupuk bersubsidi

a. Kepentingan aktor yang terlibat

Masih adanya individu penyewa lahan yang dapat membeli pupuk bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung dengan memiliki koneksi dalam kelompok tani, kedua masih adanya kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan dalam menjual pupuk bersubsidi dan ketiga adanya pembeli dari kelompok lain yang dapat membeli di kios yang bukan menjadi tanggung jawabnya.

b. Karakteristik pelaksana

Dari hasil wawancara dapat dikatakan bahwa, kurang terciptanya kepercayaan dari petani terhadap kelompok tani hal ini disebabkan bahwa adanya otoritasasi dalam pengambilan kebijakan dan tidak melibatkan anggota dalam pengambilan kebijakan.

c. Kepatuhan dan daya tanggap

Dari hasil wawancara diatas diketahui bahwa pertama, masih adanya petani dalam pemberian pupuk bersubsidi pada saat musim tanam tidak sesuai dengan anjuran pupuk berimbang yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga data RDKK yang diberikan masih berdasarkan hitung-hitungan dari budaya cara tanam keluarga. Kedua, bahwa distributor fokus hanya pada penjualan sehingga dari penjualan tersebut distributor dapat mengambil keuntungan sedangkan berdasarkan Peremendag Nomor 15 Tahun 2015 distributor

seharusnya wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di kios yang ada dibawahnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu kedepan sesuai dengan RDKK, dalam hal ini distributor dapat melihat di RDKK bahwa sudah terdapat musim tanam pertama hingga ketiga, tidak hanya mendistribusikan pupuk karena ingin mencari keuntungan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dari hasil penelitian oleh peneliti tentang pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan :

a. Kepentingan aktor yang terlibat

Masih adanya individu penyewa lahan yang dapat membeli pupuk bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung dengan memiliki koneksi dalam kelompok tani, kedua masih adanya kepentingan pribadi untuk mencari keuntungan dalam menjual pupuk bersubsidi dan ketiga adanya pembeli dari kelompok lain yang dapat membeli di kios yang bukan menjadi tanggung jawabnya.

b. Karakteristik pelaksana

Kurang terciptanya kepercayaan dari petani terhadap kelompok tani hal ini disebabkan bahwa adanya otoritasasi dalam pengambilan kebijakan dan tidak melibatkan anggota dalam pengambilan kebijakan.

c. Kepatuhan dan daya tanggap

Masih adanya petani dalam pemberian pupuk bersubsidi pada saat musim tanam tidak sesuai dengan anjuran pupuk berimbang yang telah ditetapkan oleh pemerintah sehingga data RDKK yang diberikan masih berdasarkan hitung-hitungan dari budaya cara tanam keluarga. Kedua, bahwa distributor fokus hanya pada penjualan sehingga dari penjualan tersebut distributor dapat mengambil keuntungan sedangkan berdasarkan Peremendag Nomor 15 Tahun 2015 distributor seharusnya wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi di kios yang ada dibawahnya paling sedikit untuk kebutuhan 2 (dua) minggu kedepan sesuai dengan RDKK, dalam hal ini distributor dapat melihat di RDKK bahwa sudah terdapat musim tanam pertama hingga ketiga, tidak hanya mendistribusikan pupuk karena ingin mencari keuntungan.

Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi, saran dari peneliti sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi seharusnya sesuai dengan RDKK yang valid sehingga.
2. Perlu adanya sikap yang tegas dari beberapa pihak yang terkait dalam pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi di Desa Ajung Kecamatan Ajung sehingga tidak ada lagi kepentingan-kepentingan individu tertentu yang memanfaatkan penyaluran pupuk bersubsidi untuk mencari untung.

3. Kepemimpinan dalam pengurus kelompok tani seharusnya demokratis agar terjadi keharmonisan dan kepercayaan antar sesama anggota kelompok tani.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Winarno, Budi. 2012. *Teori dan Proses dan Studi Kasus Kebijakan Publik*. Yogyakarta: CAPS.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Publik Di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ahmadi, Ruslam. 2014. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonna S. 2011. *The Sage Handbook Of Qualitative Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soehartono, Irawan. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT.Remaja Rosda Karya.
- Singarimbun, M., Effendi, S. 1995. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia.
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Deliarnov.2006. *Ekonomi Politik*. Jakarta: Erlangga

Undang-Undang

- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 103/Permentan/SR.130/11/2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan Dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian.
- Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kebutuhan Dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Tahun Anggaran 2015.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani Dan Gabungan Kelompok Tani.
- Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) Pupuk Bersubsidi Direktorat Pupuk Dan Prestisida Direktorat Jendral Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian 2014.
- SK Bupati Nomor 188.23/23/012/2014 Tentang Komisi Pengawasan Pupuk Dan Prestisida Kabupaten Jember

Internet

[http://www.Bisnis.com/Jember Dapat Tambahan Pupuk Bersubsidi 17.165 Ton Bisnis Jatim.html](http://www.Bisnis.com/Jember_Dapat_Tambahan_Pupuk_Bersubsidi_17.165_Ton_Bisnis_Jatim.html)) diakses 29 November 2014

[http://bisnis.com/2014/9/ Bisnis Jatim.html](http://bisnis.com/2014/9/Bisnis_Jatim.html) diakses 30 November 2014

[http://Kementan .go.id](http://Kementan.go.id) diakses 20 November 2014

[http://Jemberkab.bps .go.id](http://Jemberkab.bps.go.id) diakses 20 November 2014

